



WALI KOTA CIMAHI

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA CIMAHI TAHUN 2019

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka tersusunnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kota Cimahi Tahun 2019. RLPPD ini disusun untuk memenuhi amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

I. PENDAHULUAN

Gambaran Umum Kota Cimahi

Dengan Luas Wilayah 40,25Km² (4.025,73 ha) terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 15 (lima belas) kelurahan, Kota Cimahi yang secara geografis terletak diantara 107°30'30" BT – 107°34'30" dan 6°50'00" – 6°56'00" Lintang Selatan dan berbatasan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota yang berpenduduk 553.755 orang dengan pembagian antara perempuan dan laki-laki dengan jumlah perempuan sebanyak 274.915 jiwa atau sekitar 49,62%, sedangkan penduduk pria sebanyak 278.840 jiwa atau sekitar 50,38%. Kota Cimahi pada tahun 2019 telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, walaupun dengan luas wilayah yang relatif sempit dan memiliki karakteristik yang cukup unik antara lain berada di kawasan bandung utara dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) serta merupakan kota yang sarat dengan pusat-pusat pendidikan militer, Kota Cimahi telah dapat membuktikan bahwa keterbatasan luas wilayah dan sumber daya alam dapat diatasi diantaranya dengan optimalisasi penggalan dan pengembangan potensi lain terutama sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya pembangunan.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 maka Visi yang hendak diwujudkan oleh Kota Cimahi adalah **MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA.**

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni ; Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Adapun arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi berdasarkan RPJMD 2017-2022 Berdasarkan Arah kebijakan pembangunan tersebut, maka Tema Pembangunan tahun 2019 adalah "Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan didukung Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas".

C. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 diantaranya :

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- 3) Peningkatan Penanganan PMKS
- 4) Peningkatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi
- 5) Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019
- 6) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
- 7) Peningkatan Produktivitas Pelaku Ekonomi Rakyat
- 8) Peningkatan RTH dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 9) Penanganan Banjir dan peningkatan kesiapsiagaan tanggap bencana
- 10) Penataan Kawasan Kumuh
- 11) Pengembangan Jaringan Jalan dan Manajemen Transportasi

III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan pendidikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 101.556.256.777 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 95.943.921.775 atau 94,47% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan kesehatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 192.035.864.227 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 182.127.048.757 atau 94,84% dengan realisasi fisik mencapai 92,92%. Kesehatan: hasil capaian kinerja belum 100% karena :

- Terdapat capaian indikator yang masih rendah akibat belum semua masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan khususnya FKTP.
- Pada beberapa indikator terdapat permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan terutama pada kegiatan-kegiatan di puskesmas sehingga hasil pelaporan menjadi kurang maksimal.
- Terdapat indikator yang tidak tercapai akibat adanya rasionalisasi anggaran

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja langsung urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar Rp. 171.136.853.288 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.918.136.855 atau 57,22% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 sebesar Rp. 106.342.775.251 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.240.457.136 atau 95,20% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja langsung urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.622.541.752 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.113.399.654 atau 95,97% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

6. Urusan Sosial

Alokasi anggaran belanja langsung urusan social pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.530.084.456 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.283.854.768 atau 94,56% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

7. Urusan Tenaga Kerja

Alokasi anggaran belanja langsung urusan tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.099.071.375 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.940.600.375 atau 92,45% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi anggaran belanja langsung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.535.374.700 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.943.336 atau 78,21% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

9. Urusan Pangan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan pangan pada tahun 2019 sebesar Rp. 647.243.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 600.268.150 atau 92,74% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

10. Urusan Pertanian

Alokasi anggaran belanja langsung urusan pangan pada tahun 2019 sebesar Rp. 394.840.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 360.650.634 atau 91,34% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019 sebesar Rp. 34.031.014.550 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.311.581.318 atau 92,01% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.523.045.691 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.320.460.321 atau 96,33% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 sebesar Rp. 55.494.245.240 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.385.747.484 atau 98,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.735.367.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.283.307.394 atau 87,90% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

15. Urusan Perhubungan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Perhubungan pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.251.479.532 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.748.186.881 atau 90,75% dengan realisasi fisik mencapai 76%. Capaian kinerja tidak 100% disebabkan adanya rasionalisasi anggaran. Akibat rasionalisasi ini, kegiatan-kegiatan tidak dapat seluruhnya dilaksanakan untuk memenuhi target yang ditetapkan di dalam Renja Perubahan. Selain itu, adanya rasionalisasi anggaran ini tidak disertai dengan adanya perubahan target pada dokumen Renja Perubahan. Hal ini berpengaruh terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.192.043.537 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.817.105.713 atau 92,78% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

17. Urusan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.175.977.580 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.095.025.960 atau 96,28% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

18. Urusan Penanaman Modal

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.122.071.700 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.906.292.650 atau 89,83% dengan realisasi fisik mencapai 48%. Capaian kinerja tidak 100% disebabkan adanya rasionalisasi anggaran. Akibat rasionalisasi ini, kegiatan-kegiatan tidak dapat seluruhnya dilaksanakan untuk memenuhi target yang ditetapkan di dalam Renja Perubahan. Selain itu, adanya rasionalisasi anggaran ini tidak disertai dengan adanya perubahan target pada dokumen Renja Perubahan. Hal ini berpengaruh terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.199.240.600 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.145.358.799 atau 98,32% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

20. Urusan Statistik

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Statistik pada tahun 2019 sebesar Rp. 418.079.365 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 320.182.962 atau 76,58% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

21. Urusan Persandian

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Persandian pada tahun 2019 sebesar Rp. 178.129.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 143.480.497 atau 80,55% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

22. Urusan Kebudayaan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Kebudayaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.669.743.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.606.967.100 atau 96,24% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

23. Urusan Perpustakaan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Perpustakaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 673.401.600 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 631.376.950 atau 93,76% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

24. Urusan Kearsipan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Kearsipan pada tahun 2019 sebesar Rp. 713.437.059 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 610.244.732 atau 85,54% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Capaian kinerja pelaksanaan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.119.555.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 989.734.500 atau 88,40% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Urusan Pariwisata

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Pariwisata pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.582.263.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.492.327.061 atau 94,32% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

3. Urusan Pertanian

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Pertanian pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.662.648.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.576.025.512 atau 94,79% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

4. Urusan Perdagangan

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Perdagangan pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.499.156.521 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.622.713.880 atau 88,31% dengan realisasi fisik mencapai 99,89%.

5. Urusan Perindustrian

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Perindustrian pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.549.023.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.045.192.754 atau 90,92% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

6. Urusan Transmigrasi

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Transmigrasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 0 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau 0% dengan realisasi fisik mencapai 0%.

C. Prioritas Urusan Penunjang Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan alokasi anggaran belanja langsung Urusan Penunjang Pemerintahan pada tahun 2019 sebesar Rp. 15.430.565.770 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.626.294.198 atau 88,31% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

D. Prioritas Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran belanja langsung urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2019 sebesar Rp. 952.564.310 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 884.436.900 atau 92,85% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

IV. PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2019, Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi yaitu :

NO	NASIONAL	JAWA BARAT	CIMAH
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya	▪ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat ▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ▪ Peningkatan Penanganan PMKS ▪ Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran ▪ Penataan Kawasan Kumuh
2	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan	Pengembangan Jaringan Jalan dan Manajemen Transportasi

3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa Produktif	Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK)	Peningkatan Produktivitas Pelaku Ekonomi Rakyat
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	▪ Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan RTH dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		▪ Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustry berkelanjutan	Penanganan Banjir dan peningkatan kesiapsiagaan tanggap bencana
5	Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilihan Umum	Penguatan Reformasi Birokrasi	▪ Peningkatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi ▪ Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan Yang Diterima

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Sumber dana berasal dari : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebesar Rp. 15.400.000.000,-
 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
- Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 776.680.750,-
 - Kegiatan Revitalisasi Posyandu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas Umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 adalah :

1. Kerja Sama Antar Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan kerjasama dengan beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota Diantanya dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bangli, Provinsi Jawa Barat.

2. Kerjasama dengan Pihak ke Tiga

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mengadakan berbagai Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga adapun kerja sama yang dilakukan pihak ketiga di luar dana hibah sebanyak 158 Perjanjian Kerja Sama

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam rangka penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu adanya kerjasama dan bantuan yang saling timbal balik dengan instansi vertikal. Manfaat yang di hasilkan diantaranya :

- a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk masyarakat Kota Cimahi;
- b. Memberikan masukan kepada Wali Kota dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan Sosial Masyarakat, Bangsa dan Negara;
- c. Menjaga sinergitas diantara instansi vertikal yang melaksanakan kewenangan pada bidang keamanan dan ketertiban dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Cimahi.

4. Pembinaan Batas Wilayah

Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendukung melaksanakan pemasangan pilar batas antar kelurahan dan tersedianya data koordinat pilar batas antar kelurahan di Kota Cimahi sebanyak 12 (dua belas) pilar tersebar di Kecamatan Cimahi Utara, dengan jenis pilar terpasang diantaranya Pilar Batas Utama (PBU) yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas serta Pilar Acuan Batas Utama (PABU), yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas. Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial. Di tahun yang sama pada triwulan IV Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendapat bantuan dari APBN yang dianggarkan dan dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) berupa 30 (tiga puluh) pilar yang tersebar di Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kota Cimahi berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2018 memiliki skor 120 masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Secara umum, sejarah kebencanaan di Kota Cimahi relatif sedang dari berbagai kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Cimahi dalam kurun waktu 2011 – 2016, adapun jenis-jenis bencana yang terjadi di wilayah Kota Cimahi terdiri dari Banjir, Longsor/Gerakan tanah Cukup sering, Kebakaran, dan Kegagalan Teknologi.

Antisipasi daerah pada tahun 2019 dalam menghadapi kemungkinan bencana yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut melaksanakan Kajian Mitigasi; Pelatihan Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam; Pelatihan Penaksiran Kerusakan Dan Kerugian Akibat Bencana Alam; Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan bagi Korban Bencana; dan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana.

6. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (tramtibum) dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana hal ini menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tramtibum menjadi hal yang mutlak, karena terciptanya Tramtibum akan berkontribusi positif terhadap suksesnya

pembangunan Kota Cimahi. Dalam rangka menciptakan tramtibus, Satpol PP membagi kegiatannya menjadi 4 bagian, yaitu Preemtif, Preventif, Represif dan Penindakan Yudisial.

VII. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN 2019

Penetapan SPM yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pasal 2 SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran, adapun dalam penetapan SPM harus bersifat mutlak dan mudah distandarkan, sehingga setiap warga Negara memperoleh pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal. Penerapan dan capaian SPM Kota Cimahi tahun 2019 diantaranya :

1. PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN %	REALISASI %
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	97,59
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100	90,66

2. KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN %	REALISASI %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	95.09
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	97.31
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94.95
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	53.93
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatakan layanan kesehatan	100	71.55
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	90.08

7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	70.26
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	72.96
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98.36
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	114.32
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	74.06
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	69.02

3. PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN %	REALISASI %
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	70.35
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	75.98

4. PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN %	REALISASI %
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara berkorban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100	NA

5. TRANTIBUMLINMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN %	REALISASI %
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	NA
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	3.87
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	3.87
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100

6. SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN %	REALISASI %
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap % paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100

VIII. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Utama hasil reuiu terdiri dari dari 21 Sasaran dan 25 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja hasil reuiu RPJMD yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi, untuk Misi 1 terdiri dari 3 sasaran dan 3 indikator, Misi 2 terdiri dari 5 sasaran dan 7 indikator untuk, untuk Misi 3 terdiri dari 3 sasaran dan 4 indikator, Misi 4 terdiri dari 8 sasaran dan 8 indikator,

Misi 5 terdiri dari 2 sasaran dan 3 indikator. Adapun ketercapaian indikator kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2019 dirinci dalam matrik sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul					
1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	74.15	74.18	100.89%
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82.49	82.91	100.51%
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.2	1.07	112.14%
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik					
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP	Nilai BB	B	B
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
7	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	77	46.65	60.58%
8	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	80	80.75	100.94%
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai B	Nilai B	Nilai B
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 Indeks	3.16	121.53%
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan					
9	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	5.66%	6.84%	120.85%
10	Meningkatkan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0.4	0.398	100.50%
11	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5.61%	4.39%	127.64%
		TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	7.52%	8.08%	107.45%
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan					
12	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	D	C	C

13	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	100%	96.06%	96.06%
14	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	83.41%	75.98%	91.09%
15	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0.23%	0.12%	147.83%
16	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air bersih	72.02%	70.35%	97.68%
17	Mengurangi luas kawasan kumuh	Rasio luas kawasan kumuh	3.78%	3.16%	119.60%
18	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
19	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	33.3	46.80	140.54%
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan					
20	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80%	100%	125%
21	Meningkatkan pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.75%	77.21%	104.69%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.5%	92.20%	96.68%

IX. PENUTUP

Wali Kota Cimahi menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2019. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan yang berbasis pada sumber daya manusia yang berdaya saing. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, meningkatkan realisasi program/kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam Penetapan Belanja Daerah Kota Cimahi dilandasi kepada aturan yang mengacu kepada arah dan kebijakan umum serta strategi prioritas pembangunan Kota Cimahi Tahun 2019. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi (APBD) Tahun 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menetapkan

Belanja Daerah sebesar Rp 1.774.504.742.786,00. Selanjutnya terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 besarnya belanja daerah sebesar Rp 1.670.182.639.520,00 dengan rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 654.981.383.526,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 607.174.628.161,00 atau 92,70% sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp 1.020.383.397.593,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 894.353.402.311,00 atau 87,65%.

Dukungan yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi beserta seluruh warga masyarakat Kota Cimahi untuk pembangunan Kota Cimahi diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga pada tahun 2019 Kota Cimahi memperoleh 12 (Dua Belas) penghargaan tingkat nasional dan 10 penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang. Selain itu ada inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2019 sebanyak 35 Inovasi Daerah diantaranya urusan Kesehatan ada Pungut Cangang (PUCANG), Siswa Siaga (Siap Antar Jaga) dan sebagainya. Adapun dari urusan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sistem Informasi Manajemen Industri (SIMANTRI), Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sistem Informasi Bencana Daerah (SIBEDA) dan lainnya.

Semoga laporan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabel, sehingga apa yang telah kita laksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kota Cimahi pada khususnya serta pembangunan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Atas semua itu, kami dengan ikhlas dan hati yang terbuka selalu siap untuk menerima masukan dan saran dari semua pihak, khususnya dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penyempurnaan di masa mendatang dan dalam rangka upaya dukungan bagi kemajuan Kota Cimahi, sebagaimana Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Seiring dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan secara tulus kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat Kota Cimahi yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, baik berupa moril maupun materiil, sehingga eksistensi Kota Cimahi semakin nyata. Besar harapan kami di masa mendatang dukungan dan bantuan dari semua pihak dapat terus diwujudkan, agar dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan bahu membahu dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memantapkan eksistensi Kota Cimahi melalui fungsi dan peran kita masing-masing. Semoga kontribusi yang diberikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.



WALI KOTA CIMAHI,

Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.